



**BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 50 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS;
- b. bahwa pelaksanaan perjalanan dinas didasarkan pada kepentingan tugas dengan mengacu kepada efektifitas dan efisiensi serta skala prioritas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PNS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Bumbu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.



6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara, TNI, POLRI.
7. Non PNS adalah Staf khusus Bupati, Tenaga ahli DPRD, Staf ahli fraksi DPRD, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak, Honorer atau yang dipersamakan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.
10. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap dan Non PNS lainnya, dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukannya semula.
11. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan dengan tujuan kecamatan dan desa dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
12. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi adalah Perjalanan Dinas keluar tempat kedudukan dengan tujuan kabupaten/kota dan/atau kecamatan dan/atau desa di luar wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
13. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi adalah Perjalanan Dinas keluar tempat kedudukan dengan tujuan Provinsi dan/atau kabupaten/kota dan/atau kecamatan dan/atau desa di luar wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan Provinsi Kalimantan Selatan.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran daerah sesuai dengan Keputusan Bupati.
16. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
18. Pelaksana SPPD adalah Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, pegawai negeri sipil dan Non PNS, yang melaksanakan perjalanan dinas.
19. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
20. Biaya Riil adalah biaya yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran yang sah.
21. Satuan Biaya adalah batas tertinggi biaya yang dapat diberikan kepada pelaksana SPPD.

## **BAB II JENIS PERJALANAN DINAS**

### **Pasal 2**

Perjalanan dinas meliputi:

- a. perjalanan dinas dalam daerah;
- b. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi; dan
- c. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.

### **Pasal 3**

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi perjalanan dinas untuk keperluan:
  - a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
  - b. diharuskan menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - c. untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
  - d. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu karena melakukan tugas;
  - e. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
  - f. menjemput dan/atau mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan
  - g. perjalanan dinas untuk melakukan koordinasi, konsultasi dan sejenisnya ke instansi terkait baik dalam provinsi maupun di luar provinsi.
- (2) Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri pelatihan, bimbingan teknis, dan sejenisnya dalam peningkatan SDM hanya diperkenankan yang penyelenggaranya Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Non Pemerintah yang telah bekerjasama dan direkomendasikan oleh Instansi Pemerintah.
- (3) Pelatihan atau sosialisasi atau bimtek yang pesertanya wajib membayar kontribusi hanya diperuntukkan bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan CPNS.

## **BAB III PENERBITAN SPPD DAN BATASAN PERJALANAN DINAS**

### **Pasal 4**

- (1) Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan setelah diterbitkannya SPT dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang kepada pelaksana perjalanan dinas.



- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT adalah pimpinan DPRD, Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD adalah:
  - a. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran; atau
  - b. kuasa pengguna anggaran.
- (4) Dalam hal Kepala SKPD tidak berada di tempat kedudukan, kewenangan penandatanganan SPT dan SPPD dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam penerbitan SPPD, PA atau KPA berwenang untuk menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas, lamanya perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas.
- (6) Dalam hal pelaksana perjalanan Dinas adalah :
  - a. kepala SKPD untuk SPT ditandatangani oleh atasan langsungnya yaitu Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati; dan
  - b. Camat dan Lurah untuk SPT ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati untuk perjalanan dinas dalam daerah.
- (7) Bentuk dan Format SPPD tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Penerbitan SPT dan SPPD dalam daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten dalam rangka pemeriksaan berlaku ketentuan berikut:
  - a. perjalanan dinas dilaksanakan minimal selama 8 (delapan) jam;
  - b. lamanya perjalanan dinas 5 hari yang ditetapkan oleh Bupati atau Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau u.b. Inspektur; dan
  - c. dalam hal pemeriksaan lanjutan terhadap obyek pemeriksaan yang sama SPT dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau u.b. Inspektur.
- (2) Untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam 1 (satu) wilayah kecamatan tempat kedudukan selain yang dimaksud ayat (1), dapat diterbitkan SPT dan SPPD dengan ketentuan berikut:
  - a. tempat tujuan tidak dapat ditempuh dengan hanya menggunakan angkutan darat, dan harus dilaksanakan minimal 8 (delapan) jam; atau
  - b. tempat tujuan yang ditempuh dengan menggunakan angkutan darat minimal berjarak 5 km dari tempat kedudukan.
- (3) Batas waktu perjalanan dinas yang dilaksanakan berdasarkan undangan berlaku ketentuan berikut:
  - a. untuk undangan yang bertempat di luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi, pelaksanaan perjalanan dinas ditambah 1 (satu) hari sebelum acara dan 1 (satu) hari setelah acara; atau

- b. untuk undangan yang bertempat di dalam daerah, pelaksanaan perjalanan dinas sesuai tanggal undangan.
- (4) Batas waktu perjalanan dinas selain yang dimaksud ayat (1) dan ayat (3) adalah:
  - a. perjalanan dinas dalam daerah selama-lamanya 1 (satu) hari;
  - b. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi maksimal selama 3 (tiga) hari; dan
  - c. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi maksimal selama 4 (empat) hari.
- (5) Dapat diberikan waktu untuk perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a maksimal selama 2 (dua) hari, bila dilakukan di tempat-tempat tertentu yaitu:
  - a. seluruh desa di wilayah Kecamatan Satui;
  - b. desa Tamunih dan Desa Batu Bulan di wilayah Kecamatan Kusan Hulu; dan
  - c. desa Emil Baru di wilayah Kecamatan Mantewe;

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran, setiap pejabat struktural dan PNS Non Eselon diperkenankan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. eselon II dan pejabat fungsional utama maksimal 2 (dua) kali;
  - b. eselon III dan pejabat fungsional madya maksimal 1 (satu) kali;
  - c. PNS Golongan IV Non eselon maksimal 1 (satu) kali;
  - d. eselon IV dan pejabat fungsional muda maksimal 1 (satu) kali;
  - e. PNS Non Eselon dan pejabat fungsional pertama; dan
  - f. Non PNS.
- (2) Dalam hal kepentingan mendesak, pelaksana SPPD diperkenankan melaksanakan perjalanan dinas dan perjalanan dinas tambahan diluar ketentuan pada ayat (1), pejabat atau Staf instansi vertikal dapat diberikan SPPD sesuai dengan jabatan atau golongan maka biaya perjalanan dinas dapat dibebankan pada DPA Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (3) Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati dan/atau Sekretaris Daerah.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan untuk Sekretaris Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) perjalanan dinas yang mengikut sertakan masyarakat atau pihak ketiga diberikan biaya dalam kode rekening jasa transportasi dan jasa akomodasi berupa:
  - a. transpor;
  - b. akomodasi; dan
  - c. uang saku.



## **BAB IV** **BIAYA PERJALANAN DINAS**

### **Pasal 7**

- (1) Biaya Perjalanan Dinas diberikan kepada pelaksana SPPD, terdiri dari:
  - a. biaya transpor;
  - b. biaya penginapan;
  - c. uang harian;
  - d. uang representatif; dan
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 9 (sembilan) tingkat, yaitu:
  - a. tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
  - b. tingkat B untuk Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah;
  - c. tingkat C untuk Pejabat Eselon IIb; setara dengan pejabat fungsional utama;
  - d. tingkat D untuk Pejabat Eselon III dan PNS Golongan IV Non Eselon; setara dengan pejabat fungsional madya dan Staf Khusus Bupati non PNS;
  - e. tingkat E untuk Pejabat Eselon IV setara dengan pejabat fungsional muda dan ajudan Bupati dan Wakil Bupati
  - f. tingkat F untuk PNS Golongan III Non Eselon setara dengan pejabat fungsional pertama;
  - g. tingkat G untuk PNS Golongan II dan I; setara dengan Pengawal Pribadi Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - h. tingkat H untuk Non PNS.

### **Pasal 8**

- (1) Biaya transport perjalanan dinas sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat (1) huruf a diberikan secara riil.
- (2) Biaya transport perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar provinsi diberikan dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan, termasuk biaya taksi dan biaya yang dipungut di bandara atau pelabuhan atau terminal atau stasiun.
- (3) Biaya taksi sebagaimana dimaksud ayat (2), diberikan secara riil dari bandara atau pelabuhan atau terminal atau stasiun ketempat menginap atau tempat acara dan sebaliknya.
- (4) Dalam hal transportasi memerlukan transit, maka transit harus dilaksanakan pada hari yang sama.
- (5) Dalam hal transit dilaksanakan pada hari yang berbeda, kepada pelaksana SPPD hanya diberikan biaya transport ke kota tujuan dan/atau yang meninggalkan kota tujuan.
- (6) Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) dikecualikan untuk transit yang diperlukan karena menunggu penerbangan ke kota tujuan melalui bandara Syamsuddin Noor pada hari kedua.
- (7) Satuan biaya transpor tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

### **Pasal 9**

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b, diberikan secara riil untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi.
- (2) Dalam hal pelaksana SPPD tidak melampirkan bukti pembayaran menginap dan biaya menginap tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara kegiatan, maka akan diberikan biaya menginap sebesar 30% per hari, sesuai tingkatan biaya perjalanan dinas.
- (3) Biaya menginap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara lumpsum.
- (4) Satuan biaya penginapan tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

### **Pasal 10**

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf c, diberikan secara lumpsum.
- (2) Uang harian diberikan selama melaksanakan perjalanan dinas, terhitung mulai tanggal menuju kota tujuan sampai dengan meninggalkan kota tujuan.
- (3) Perhitungan pemberian uang harian sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan bukti transpor kepergian dan kepulangan.
- (4) Dalam hal bukti transpor hanya dilampirkan salah satu dari kepergian atau kepulangan, kepada pelaksana SPPD dapat diberikan uang harian sebagai berikut:
  - a. diberikan uang harian selama 1 (satu) hari untuk perjalanan dinas dalam daerah;
  - b. diberikan uang harian selama 2 (dua) hari untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.
- (5) Dalam hal pelaksana SPPD tidak melampirkan bukti transpor, baik kepergian maupun kepulangan, tidak dapat diberikan uang harian.
- (6) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.



### **Pasal 11**

- (1) Uang Representatif diberikan dalam kedudukan dan jabatan tertentu, selama melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Pejabat yang diberikan uang representatif adalah:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - c. Pejabat Eselon II a; dan
  - d. Pejabat Eselon II b.
- (3) Satuan biaya uang Representatif diberikan secara lumpsum, sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## **BAB V**

### **PENGANGGARAN DAN PEMBEBANAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

### **Pasal 12**

- (1) Penganggaran satuan biaya perjalanan dinas tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada SKPD, harus memperhatikan ketersediaan dana dan satuan harga pada DPA-SKPD.
- (3) Dalam hal masih terdapat sisa dana anggaran perjalanan dinas di SKPD, biaya perjalanan dinas dapat dipergunakan kembali sesuai masing-masing tingkatan dan jenis perjalanan dinas yang tercantum dalam DPA-SKPD.
- (4) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
- (6) Pelaksana SPPD dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

## **BAB VI**

### **PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

### **Pasal 13**

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada PA dan/atau KPA.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. dasar surat perintah tugas;
  - b. surat perintah tugas;

- c. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA atau KPA dan telah di-visum oleh pejabat yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - d. laporan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pelaksana SPPD;
  - e. surat pernyataan biaya riil, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
  - f. Bukti transportasi angkutan darat untuk kepergian dan kepulangan, antara lain :
    - 1. pembayaran pembelian BBM; dan/atau
    - 2. pembayaran travel; dan/atau
    - 3. pembayaran tiket bus, pembayaran peron; dan/atau
    - 4. pembayaran moda transportasi darat lainnya.
  - g. bukti transportasi angkutan udara untuk kepergian dan kepulangan:
    - 1. tiket pesawat yang mencantumkan nilai pembayaran, boarding pas, airport-tax.
    - 2. dalam hal transportasi udara disediakan oleh panitia penyelenggara, cukup melampirkan fotocopy boarding pas.
  - h. bukti transportasi angkutan di atas air untuk kepergian dan kepulangan :
    - 1. pembayaran tiket kapal laut, pembayaran peron; dan/atau
    - 2. pembayaran moda transportasi di atas air lainnya.
  - i. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi, bagi yang menggunakan fasilitas penginapan.
- (3) Dalam hal Pelaksana SPPD lalai dalam menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), yang bersangkutan tidak diperkenankan melaksanakan perjalanan dinas berikutnya.

#### **Pasal 14**

Dasar Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a, adalah:

- a. nota dinas usulan melaksanakan perjalanan dinas; dan/atau
- b. surat, telexgram, faxmile, email atau yang disamakan dari instansi terkait dan lembaga lain.

### **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 15**

Perjalanan dinas yang lebih dari 4 (empat) hari untuk diklat, yang tercantum dalam DPA Badan Kepegawaian Daerah diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati



**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**




**Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka, Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dan Dengan Nama Lainnya atau yang Disamakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

PARAF	
SEKDA	
ASISTEN. ....	
BAGIAN HUKUM	
.....	


ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 31 Desember 2014.

**BUPATI TANAH BUMBU,**

  
**MARDANI H. MAMING**

diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 31 Desember 2014.

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

  
**SAID AKHMAD**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**TAHUN 2014 NOMOR**

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 50 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON  
PNS

CONTOH FORMAT SPPD  
BAGIAN DEPAN

KOP SURAT

Lembar ke : .....  
Kode No : .....  
Nomor : .....

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS  
(S P P D)

1.	Pejabat berwenang yang memberi Perintah	:	
2.	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	:	
3.	a. Pangkat dan Golongan Ruang	:	
	b. Jabatan/ Instansi	:	
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	:	
4.	Maksud Perjalanan Dinas	:	
5.	Alat Angkut Yang dipergunakan	:	
6.	a. Tempat Berangkat	:	
	b. Tempat Tujuan	:	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas	:	
	b. Tanggal Berangkat	:	
	c. Tanggal Harus Kembali	:	
8.	Pengikut :		
	1 .....	:	
	2 .....	:	
9.	Pembebanan Anggaran		
	a. Instansi	:	
	b. Mata Anggaran	:	
10.	Keterangan Lain-lain	:	

Batulicin, tgl/bulan/tahun.

PenggunaAnggaran/  
KuasaPenggunaAnggaran

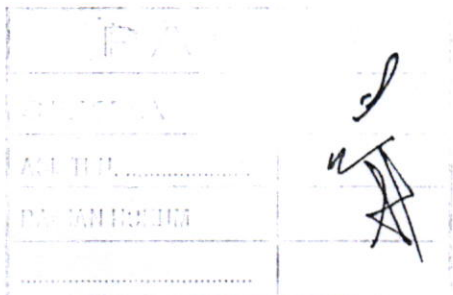
nama  
Pangkat  
NIP




BAGIAN BELAKANG

Berangkat dari: Batulicin (Tempat Kedudukan) Ke: Pada tanggal:		Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran  <u>nama</u> Pangkat NIP
II	Tiba di: Pada tanggal:  (.....) NIP.	Berangkat dari: Pada tanggal:  (.....) NIP.
III	Tiba di: Pada tanggal:  (.....) NIP.	Berangkat dari: Pada tanggal:  (.....) NIP.
IV	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tiba di: Batulicin Pada tanggal :  Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran  <u>nama</u> Pangkat NIP	

V. PERHATIAN:  
Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, parapejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan Peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.



BUPATI TANAH BUMBU,  
  
MARDANI H. MAMING

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
 NOMOR 58 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PNS

SATUAN BIAYA TRANSPOR  
 PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (PP)

(dalam rupiah)		
BERANGKAT	TUJUAN (KECAMATAN)	SATUAN BIAYA
Batulicin	Simpang Empat	25,000
Batulicin	Kusan Hilir	35,000
Batulicin	Karang Bintang	50,000
Batulicin	Sei Loban	50,000
Batulicin	Mantewe	75,000
Batulicin	Angsana	75,000
Batulicin	Kusan Hulu	100,000
Batulicin	Kuranji	100,000
Batulicin	Satui	100,000
Simpang Empat	Kusan Hilir	35,000
Simpang Empat	Karang Bintang	50,000
Simpang Empat	Sei Loban	50,000
Simpang Empat	Mantewe	75,000
Simpang Empat	Angsana	75,000
Simpang Empat	Kusan Hulu	100,000
Simpang Empat	Kuranji	100,000
Simpang Empat	Satui	100,000
Kusan Hilir	Karang Bintang	50,000
Kusan Hilir	Sei Loban	50,000
Kusan Hilir	Mantewe	75,000
Kusan Hilir	Angsana	75,000
Kusan Hilir	Kusan Hulu	100,000
Kusan Hilir	Kuranji	100,000
Kusan Hilir	Satui	100,000



**SATUAN BIAYA TRANSPOR  
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (PP)**

*(dalam rupiah)*

BERANGKAT	TUJUAN (KECAMATAN)	SATUAN BIAYA
Karang Bintang	Sei Loban	75,000
Karang Bintang	Mantewe	75,000
Karang Bintang	Angsana	100,000
Karang Bintang	Kusan Hulu	100,000
Karang Bintang	Kuranji	100,000
Karang Bintang	Satui	100,000
Sei Loban	Mantewe	100,000
Sei Loban	Angsana	25,000
Sei Loban	Kusan Hulu	75,000
Sei Loban	Kuranji	50,000
Sei Loban	Satui	50,000
Mantewe	Angsana	100,000
Mantewe	Kusan Hulu	50,000
Mantewe	Kuranji	100,000
Mantewe	Satui	100,000
Angsana	Kusan Hulu	100,000
Angsana	Kuranji	50,000
Angsana	Satui	25,000
Kusan Hulu	Kuranji	100,000
Kusan Hulu	Satui	100,000
Kuranji	Satui	50,000
Semua Kecamatan	Temunih dan Batu Bulan (Kec. Kusan Hulu) serta Emil Baru (Kec. Mantewe)	350,000
TRANSPOR dalam Kecamatan	Radius < 5 Km	0
	Radius 5 sd 15 Km	25,000
	Radius > 15 Km	50,000
	Yang menggunakan sarana transportasi air	50,000

**SATUAN BIAYA TRANSPOR (ALAT ANGKUTAN DARAT)  
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

(dalam rupiah)

KABUPATEN /KOTA	SATUAN	TINGKATAN BIAYA					
		A	B	C	D	E	F/G/H
Kotabaru	Orang/Kali	500,000	350,000	350,000	300,000	250,000	150,000
Banjarmasin/ Banjarbaru	Orang/Kali	1,000,000	750,000	750,000	600,000	500,000	200,000
Tanah Laut	Orang/Kali	900,000	675,000	675,000	550,000	450,000	250,000
Banjar	Orang/Kali	1,100,000	775,000	775,000	625,000	525,000	275,000
Barito Koala	Orang/Kali	1,100,000	775,000	775,000	625,000	525,000	275,000
Tapin	Orang/Kali	1,200,000	850,000	850,000	700,000	550,000	300,000
Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	1,300,000	900,000	900,000	750,000	600,000	300,000
Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	1,400,000	1,000,000	1,000,000	800,000	700,000	325,000
Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	1,700,000	1,200,000	1,200,000	1,000,000	800,000	350,000
Balangan	Orang/Kali	1,700,000	1,200,000	1,200,000	1,000,000	800,000	350,000
Tabalong	Orang/Kali	2,000,000	1,500,000	1,500,000	1,200,000	1,000,000	400,000



**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT  
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (PP)**

*(dalam rupiah)*

NO	ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA UNTUK TINGKATAN BIAYA PERJALANAN DINAS	
			A (BISNIS)	B/C/D/E/F/G/H (EKONOMI)
1	BATULICIN	BANJARMASIN	1,150,000	1,150,000
2	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10,792,000	6,022,000
3	BANJARMASIN	BATAM	8,407,000	4,578,000
4	BANJARMASIN	BIAK	16,686,000	8,749,000
5	BANJARMASIN	DENPASAR	8,792,000	4,920,000
6	BANJARMASIN	JAKARTA	5,252,000	2,995,000
7	BANJARMASIN	JAYAPURA	17,135,000	9,359,000
8	BANJARMASIN	JOGJAKARTA	7,723,000	4,022,000
9	BANJARMASIN	MEDAN	10,546,000	5,412,000
10	BANJARMASIN	PADANG	9,006,000	4,642,000
11	BANJARMASIN	PALEMBANG	7,498,000	4,022,000
12	BANJARMASIN	PEKANBARU	9,049,000	4,696,000
13	BANJARMASIN	SEMARANG	7,498,000	3,958,000
14	BANJARMASIN	SOLO	7,498,000	4,097,000
15	BANJARMASIN	SURABAYA	8,942,000	4,385,000
16	BANJARMASIN	TIMIKA	16,472,000	8,717,000
17	BANJARMASIN	BANDAR LAMPUNG	6,193,000	3,412,000
18	BANJARMASIN	JAMBI	7,690,000	4,193,000
19	BANJARMASIN	MALANG	8,161,000	4,407,000
20	BANJARMASIN	MATARAM	8,803,000	4,888,000
21	BANJARMASIN	PANGKAL PINANG	7,091,000	3,915,000
22	JAKARTA	AMBON	13,285,000	7,081,000

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT  
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (PP)

(dalam rupiah)

NO	ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA UNTUK TINGKATAN BIAYA PERJALANAN DINAS	
			A (BISNIS)	B/C/D/E/F/G/H (EKONOMI)
23	JAKARTA	BANDUNG	2,064,000	1,476,000
24	JAKARTA	BALIKPAPAN	7,412,000	3,797,000
25	JAKARTA	BENGKULU	4,364,000	2,621,000
26	JAKARTA	GORONTALO	7,231,000	4,824,000
27	JAKARTA	KENDARI	7,658,000	4,182,000
28	JAKARTA	KUPANG	9,413,000	5,081,000
29	JAKARTA	MAKASAR	7,444,000	3,829,000
30	JAKARTA	MAMUJU	7,295,000	4,867,000
31	JAKARTA	MANADO	10,824,000	5,102,000
32	JAKARTA	MANOKWARI	16,226,000	10,824,000
33	JAKARTA	PALANGKARAYA	4,984,000	2,984,000
34	JAKARTA	PALU	9,348,000	5,113,000
35	JAKARTA	PONTIANAK	4,353,000	2,781,000
36	JAKARTA	TERNATE	10,001,000	6,664,000
37	AMBON	SORONG	3,637,000	2,257,000
38	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4,439,000	2,663,000
39	PALU	POSO	1,957,000	1,423,000
40	PALU	TOLI-TOLI	2,941,000	1,915,000



**SATUAN BIAYA TAKSI  
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	SATUAN BIAYA
1.	ACEH	Orang/Kali	123,000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232,000
3.	RIAU	Orang/Kali	70,000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	105,000
5.	JAMBI	Orang/Kali	128,000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	192,000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	124,000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	148,000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	92,000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	86,000
11.	BANTEN	Orang/Kali	320,000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	118,000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	170,000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	50,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	141,000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	148,000
17.	BALI	Orang/Kali	160,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	218,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	81,000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	145,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	94,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	141,000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	401,000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	353,000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	310,000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	134,000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	217,000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	128,000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	151,000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	332,000
31.	MALUKU	Orang/Kali	340,000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	403,000
33.	PAPUA	Orang/Kali	354,000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	130,000

<b>PARAF</b>	
SEKDA	
ASISTEN. ....	
PAGIAN HUKUM	

**BUPATI TANAH BUMBU,**

  
**MARDANI H. MAMING**

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 58 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PNS

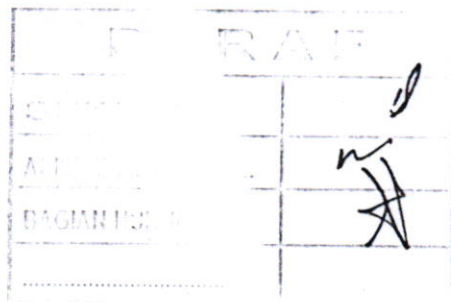
**SATUAN BIAYA PENGINAPAN  
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL UNTUK TINGKATAN				
			A	B/C	D	E	F/G/H
1.	ACEH	OH	4,420,000	1,308,000	1,080,000	410,000	370,000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4,960,000	1,214,000	703,000	505,000	310,000
3.	RIAU	OH	3,817,000	1,168,000	868,000	450,000	380,000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4,275,000	1,285,000	650,000	502,000	280,000
5.	JAMBI	OH	4,000,000	1,176,000	697,000	382,000	290,000
6.	SUMATERA BARAT	OH	4,240,000	1,155,000	884,000	477,000	370,000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	4,680,000	1,228,000	605,000	514,000	310,000
8.	LAMPUNG	OH	3,960,000	1,299,000	790,000	374,000	356,000
9.	BENGKULU	OH	1,300,000	790,000	712,000	599,000	510,000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3,335,000	1,310,000	850,000	533,000	304,000
11.	BANTEN	OH	3,808,000	1,430,000	1,024,000	797,000	400,000
12.	JAWA BARAT	OH	3,664,000	1,753,000	949,000	515,000	463,000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	8,720,000	1,086,000	800,000	610,000	400,000
14.	JAWA TENGAH	OH	4,146,000	1,478,000	1,024,000	497,000	350,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	4,620,000	1,334,000	747,000	629,000	461,000
16.	JAWA TIMUR	OH	4,400,000	1,359,000	841,000	499,000	329,000
17.	BALI	OH	4,881,000	1,810,000	1,304,000	904,000	658,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3,429,000	2,738,000	737,000	540,000	360,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3,000,000	1,000,000	700,000	662,000	400,000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2,400,000	1,130,000	866,000	430,000	361,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	3,000,000	1,596,000	923,000	558,000	436,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4,250,000	1,679,000	816,000	500,000	379,000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4,000,000	3,021,000	1,596,000	550,000	450,000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4,000,000	3,021,000	1,596,000	550,000	450,000
25.	SULAWESI UTARA	OH	3,200,000	1,553,000	640,000	549,000	342,000
26.	GORONTALO	OH	1,320,000	1,134,000	910,000	423,000	240,000
27.	SULAWESI BARAT	OH	1,260,000	1,030,000	910,000	425,000	360,000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4,820,000	1,912,000	968,000	539,000	370,000



29.	SULAWESI TENGAH	OH	2,030,000	1,298,000	894,000	493,000	389,000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	1,850,000	1,070,000	802,000	488,000	420,000
31.	MALUKU	OH	3,000,000	1,030,000	680,000	545,000	414,000
32.	MALUKU UTARA	OH	3,110,000	1,512,000	600,000	478,000	380,000
33.	PAPUA	OH	2,850,000	1,668,000	754,000	460,000	414,000
34.	PAPUA BARAT	OH	2,750,000	1,482,000	976,000	798,000	370,000



**BUPATI TANAH BUMBU,**

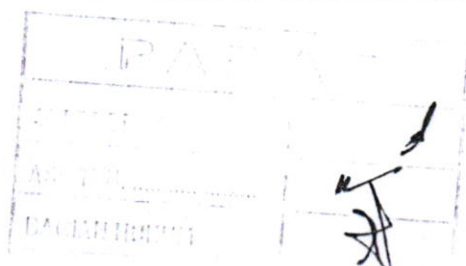
  
**MARDANI H. MAMING**

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 58 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI  
SIPII DAN NON PNS


**SATUAN BIAYA UANG HARIAN**

(dalam rupiah)

NO	TUJUAN PROVINSI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.	DALAM KABUPATEN TANAH BUMBU	OH	150,000
2.	ACEH	OH	360,000
3.	SUMATERA UTARA	OH	370,000
4.	RIAU	OH	370,000
5.	KEPULAUAN RIAU	OH	370,000
6.	JAMBI	OH	370,000
7.	SUMATERA BARAT	OH	380,000
8.	SUMATERA SELATAN	OH	380,000
9.	LAMPUNG	OH	380,000
10.	BENGKULU	OH	380,000
11.	BANGKA BELITUNG	OH	410,000
12.	BANTEN	OH	370,000
13.	JAWA BARAT	OH	430,000
14.	D.K.I. JAKARTA	OH	530,000
15.	JAWA TENGAH	OH	370,000
16.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420,000
17.	JAWA TIMUR	OH	410,000
18.	BALI	OH	480,000
19.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440,000
20.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430,000
21.	KALIMANTAN BARAT	OH	380,000
22.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360,000
23.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380,000
24.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430,000
25.	KALIMANTAN UTARA	OH	430,000
26.	SULAWESI UTARA	OH	370,000
27.	GORONTALO	OH	370,000
28.	SULAWESI BARAT	OH	410,000
29.	SULAWESI SELATAN	OH	430,000
30.	SULAWESI TENGAH	OH	370,000
31.	SULAWESI TENGGARA	OH	380,000
32.	MALUKU	OH	380,000
33.	MALUKU UTARA	OH	430,000
34.	PAPUA	OH	580,000
35.	PAPUA BARAT	OH	480,000



**BUPATI TANAH BUMBU,**

  
**MARDANI H. MAMING**



LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 58 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAN NON PNS

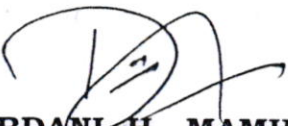
SATUAN BIAYA UANG REPRESENTATIF

(dalam rupiah)

NO	JABATAN	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH
1	Ketua DPRD	OH	250,000	125,000
2	Wakil Ketua DPRD	OH	250,000	125,000
3	Bupati	OH	250,000	125,000
4	Wakil Bupati	OH	250,000	125,000
5	Anggota DPRD	OH	200,000	100,000
6	Pejabat Eselon II a	OH	200,000	100,000
7	Pejabat Eselon II b	OH	150,000	75,000



BUPATI TANAH BUMBU,

  
MARDANI H. MAMING

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 58 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAN NON PNS



PENGANGGARAN SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

(dalam rupiah)

NO	TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS	SATUAN	JENIS PERJALANAN DINAS			
			Dalam Daerah		Dalam Daerah (Dalam Rangka Pemeriksaan oleh Inspektorat)	
			I	II	I	II
1	A	Orang/Kali	375,000	775,000	-	-
2	B	Orang/Kali	350,000	750,000	-	-
3	C	Orang/Kali	325,000	725,000	925,000	
4	D	Orang/Kali	250,000	650,000	850,000	
5	E	Orang/Kali	250,000	650,000	850,000	
6	F	Orang/Kali	250,000	650,000	850,000	
7	G	Orang/Kali	250,000	650,000	-	-
8	H	Orang/Kali	250,000	650,000	-	-

(dalam rupiah)

NO	TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS	SATUAN	JENIS PERJALANAN DINAS			
			Luar Daerah Dalam		Luar Daerah Luar Provinsi	
			I	II	I	II
1	A	Orang/Kali	12,390,000	12,990,000	36,872,000	
2	B	Orang/Kali	6,598,000	6,898,000	11,013,000	
3	C	Orang/Kali	6,448,000	6,748,000	10,813,000	
4	D	Orang/Kali	3,972,000	4,272,000	9,055,000	
5	E	Orang/Kali	3,140,000	3,340,000	8,285,000	
6	F	Orang/Kali	2,298,000	2,498,000	7,055,000	
7	G	Orang/Kali	2,298,000	2,498,000	7,055,000	
8	H	Orang/Kali	2,298,000	2,498,000	7,055,000	

PARAF	
SEKDA	
ASISTEN. ....	
BAGIAN HUKUM	
.....	

BUPATI TANAH BUMBU,

  
MARDANI H. MAMING



LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
 NOMOR 58 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN RAKYAT DAERAH,  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PNS

**SURAT PERNYATAAN  
 BIAYA RIL PERJALANAN DINAS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
 NIP :  
 Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) :

Nomor ..... tanggal .....

Tempat Tujuan .....

Tanggal berangkat ..... tanggal harus kembali .....

Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini meliputi

No	Uraian	Ada Bukti / Tidak	Jumlah (Rp)	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
...				
dst				
Jumlah				

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana

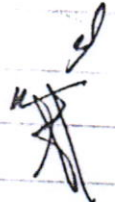
Mengetahui,  
 PA/KPA

Batulicin, .....  
 Pelaksana SPPD

.....  
 NIP ..... NIP .....

**BUPATI TANAH BUMBU,**

  
**MARDANI H. MAMING**

P/...	
SEKDA	
ASISTEN.....	
BAGIAN HUKUM	